



**KEGAGALAN KEBIJAKAN PARLEMEN TERBUKA DALAM
MENDORONG FUNGSI LEGISLASI TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN
PARTISIPATIF DI DPR RI TAHUN 2019-2023**

TESIS

**Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan
Pendidikan Strata II/S2**

Penyusun:

Arif Adiputro

NIM: 14010120410006

**DEPARTEMEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2023**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
KARYA ILMIAH (TESIS/TA*)**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama Lengkap : Arif Adiputro
2. Nomor Induk Mahasiswa : 14010120410006
3. Tempat Tanggal Lahir : Kebumen, 3 Agustus 1995
4. Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
5. Alamat : Desa Grogolbeningsari RT 01/01 Kecamatan
Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan, dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Tesis/TA) yang saya tulis berjudul :

**KEGAGALAN KEBIJAKAN PARLEMEN TERBUKA DALAM MENDORONG
FUNGSI LEGISLASI TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN PARTISIPATIF DI
DPR RI TAHUN 2019-2023.**

Adalah benar-benar Hasil Karya Ilmiah Tulisan Saya Sendiri, bukan hasil karya ilmiah orang lain atau jiplakan karya ilmiah orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata karya ilmiah yang saya tulis ini terbukti bukan hasil karya ilmiah saya sendiri atau hasil jiplakan karya orang lain, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan hasil karya ilmiah saya dengan seluruh implikasinya, sebagai akibat kecurangan yang saya lakukan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab.

Semarang, 9 Maret 2023

Pembuat Pernyataan

Arif Adiputro



NIM 14010120410006

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tesis : **Kegagalan Kebijakan Parlemen Terbuka Dalam Mendorong Fungsi Legislasi Transparan, Akuntabel dan Partisipatif di DPR RI Tahun 2019-2023.**

Nama Penyusun : Arif Adiputro

NIM : 14010120410006

Departemen : Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro Semarang.

Dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata II Program Studi Ilmu Politik.

Dekan



Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T
NIP. 1964082719990011001

Wakil Dekan I



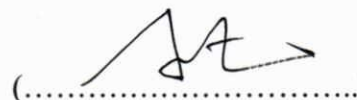
Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin
NIP. 196908221994031003

Dosen Pembimbing

1. Dr. Dra. Rina Martini, M.Si.
NIP. 196703131993032001



2. Wijayanto, S.IP, M.Si, Ph.D
NIP. 198803122018031001



Dosen Penguji

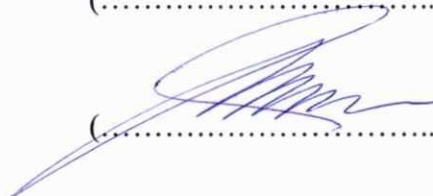
1. Dr. Laila Kholid Alfirdaus, S.IP., M.PP.
NIP. 198105072005012002



2. Dr. Dra. Kushandajani, M.S.
NIP. 196206141986032002



3. Dr. Sos. Drs. Muhammad Adnan, M.A.
NIP. 196009161987031001



MOTTO

“Pendidikan bertujuan untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan.”

- Tan Malaka -

“Tak masalah jika aku harus dipenjara. Namun, aku ingin dipenjara bersama buku, karena dengan buku aku menjadi bebas.”

- Bung Hatta -

Kegagalan Kebijakan Parlemen Terbuka Dalam Mendorong
Fungsi Legislasi Transparan, Akuntabel dan Partisipatif di DPR RI

Tahun 2019-2023

Arif Adiputro

arif.adiputro@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP UNDIP Semarang

Abstrak

Open parlemen atau Parlemen Terbuka merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mendorong parlemen untuk semakin terbuka, transparan, akuntabel, dan inklusif. Keterbukaan parlemen mulai jadi tema penting pada 2013, Beberapa negara, seperti Perancis dan Georgia, bahkan memperkenalkan rencana aksi nasional mereka sendiri. Parlemen terbuka bertujuan untuk mengatasi kesenjangan yang semakin lebar antara parlemen dan warganya dengan meningkatkan partisipasi dan keterlibatan warga negara dalam proses pengawasan kinerja parlemen.

Pada aspek partisipasi, hadirnya putusan MK yang menyinggung partisipasi bermakna, adalah sinyal agar DPR segera berbenah dalam mengelola partisipasi publik, dengan memperbaiki mekanisme dan *tools* untuk menghadirkan partisipasi yang bermakna, sehingga DPR secara sistem di desain untuk sungguh-sungguh mendengarkan, mempertimbangkan, dan memberikan feedback atas masukan-masukan publik dalam proses legislasi. Pada aspek transparansi Sebanyak 80,4% sidang pembahasan delapan RUU yang ditetapkan menjadi UU pada Tahun Sidang 2020-2021 tidak ditayangkan (74 dari 92 sidang). Sementara jumlah sidang yang ditayangkan sebanyak 18 sidang atau 19,6%. Sebagai informasi, jumlah sidang yang paling banyak ditayangkan adalah sidang RUU Cipta Kerja.

Implementasi Kebijakan Parlemen Terbuka oleh DPR RI gagal dilaksanakan dengan baik, dikarenakan menguatnya peran pimpinan partai politik dalam mempengaruhi kebijakan dan konfigurasi politik di DPR RI sehingga legislasi yang dihasilkan cenderung menuruti keinginan Pemerintah, berdasarkan teori politik hukum Mahfud MD legislasi tersebut cenderung ortodoks dan otoriter lebih tepatnya lebih mengarah ke Parlemen Tertutup. Selain itu, menguatnya oligarki dan elit menjadi catatan mengapa DPR menjadi parlemen yang tertutup, komposisi anggota DPR sekitar 55% merupakan pengusaha akan menimbulkan konflik kepentingan dalam merumuskan sebuah produk legislasi yang pro terhadap masyarakat dan hanya menguntungkan elit semata.

DPR RI perlu mempertimbangkan model kelembagaan Open Parliament Indonesia, dalam bentuk Alat Kelengkapan Dewan, sebagaimana praktik di Parlemen Georgia dan Inggris berkolaborasi dengan unsur masyarakat sipil dalam memantau implementasi parlemen terbuka di Indonesia. Selain itu Pemerintah dan DPR perlu memperbaiki sistem kepemiluan di Indonesia agar meminimalisir kekuatan oligarki dan elit di dalam DPR.

Kata Kunci : Parlemen Terbuka, Fungsi Legislasi, Konfigurasi Politik dan Oligarki

The Failure of Open Parliament Policy to Promote Transparent, Accountable and
Participatory Legislation Function in the DPR RI 2019-2023

arif.adiputro@gmail.com

Departement of Politic dan Government FISIP UNDIP Semarang

Abstract

Open parliament is an initiative that aims to encourage parliaments to be more open, transparent, accountable and inclusive. Some countries, such as France and Georgia, even introduced their own national action plans. Open parliament aims to address the widening gap between parliaments and their citizens by increasing citizen participation and engagement in the process of monitoring parliamentary performance.

On the aspect of participation, the Constitutional Court's decision on meaningful participation is a signal for Parliament to improve its management of public participation, by improving mechanisms and tools for meaningful participation, so that Parliament is systematically designed to listen, consider and provide feedback on public input in the legislative process. In terms of transparency, 80.4% of the deliberation sessions of the eight bills enacted into law in the 2020-2021 session were not aired (74 out of 92 sessions). Meanwhile, the number of sessions that were aired was 18 sessions or 19.6%. For information, the most aired session was the session of the Job Creation Bill.

The implementation of the Open Parliament Policy by the DPR RI failed to be implemented properly, due to the strengthening role of political party leaders in influencing policies and political configurations in the DPR RI so that the resulting legislation tends to comply with the wishes of the Government, based on Mahfud MD's political theory of law, the legislation tends to be orthodox and authoritarian, more precisely leading to a Closed Parliament. In addition, the strengthening of oligarchy and elites is a record of why the DPR has become a closed parliament, the composition of DPR members around 55% are businessmen will lead to conflicts of interest in formulating a legislative product that is pro-people and only benefits the elite.

The House of Representatives needs to consider an institutional model for the Indonesian Open Parliament, in the form of an Organ of the House, as is the practice in the Georgian and British Parliaments in collaboration with elements of civil society in monitoring the implementation of an open parliament in Indonesia. In addition, the Government and Parliament need to improve the electoral system in Indonesia to minimise the power of oligarchs and elites in Parliament.

Keywords : Open Parliament, legislative function, political configuration, oligarchs

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum. Wr. Wb

Alhamdulillahirobil'alamin segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, karena atas segala berkat dan rahmat-NYA, peneliti dapat menyelesaikan penyusunan penelitian ini dengan judul Implementasi Parlemen Terbuka dalam Mendorong Fungsi Legislasi di DPR RI Periode 2019-2024

Adapun maksud penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menempuh ujian tesis pada Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Diponegoro.

Sebagai rasa hormat dan rasa kebanggaan peneliti mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan kepada peneliti dalam penyusunan tesis ini, diantaranya:

Begitu pula saya ucapkan terima kasih Kepada Yang Terhormat:

1. Ibu Dr. Rina Martini, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam memberikan masukan dan arahan, serta memberi motivasi dan semangat dalam penyusunan penelitian tesis ini, sehingga bisa terselesaikan tepat waktu.
2. Mas Wijayanto, Ph.D Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam memberikan masukan dan arahan, serta memberi motivasi dan semangat dalam penyusunan penelitian ini, bisa terselesaikan tepat waktu.

Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada jajaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Jurusan Ilmu Politik:

1. Dr. Drs. Hardi Warsono, MTP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.
2. Dr. Laila Khalid Alfirdaus, S.IP, MPP Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.
3. Para dosen civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Seluruh Dosen dan Staff Tata Usaha Jurusan Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Tidak lupa juga dalam kesempatan kali ini peneliti berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu didalam proses penyusunan tesis ini, diantaranya:

1. Ibu Ledia Hanifa selaku Anggota DPR RI yang tergabung dalam Tim Open Parliament DPR RI yang telah memberikan informasi mengenai berjalannya implementasi parlemen terbuka di DPR RI
2. Bapak Johan Budi selaku Anggota DPR RI yang tergabung dalam Tim Open Parliament DPR RI yang telah memberikan informasi mengenai berjalannya implementasi parlemen terbuka di DPR RI
3. Mbak Lumina selaku Koordinator Sekretariat Open Parliament DPR RI yang memberikan informasi dan pemahaman terkait permasalahan implementasi Parlemen Terbuka
4. Bapak Ahmad Hanafi Direktur Indonesian Parliamentary Center yang telah memberikan informasi dan berbagi terkait dengan kajian yang dilakukan oleh IPC mengenai konsep parlemen terbuka
5. Bapak Arbain Program Manager Indonesian Parliamentary Center yang telah memberikan informasi dan berbagi terkait dengan kajian yang dilakukan oleh IPC mengenai konsep parlemen terbuka
6. Bang Lucius Karus Peneliti FORMAPPI yang telah berbagi mengenai informasi legislasi di DPR RI
7. Mas Ravio selaku pegiat keterbukaan data dan tata Kelola Pemerintah yang telah berbagi mengenai informasi OGP

Tidak lupa juga peneliti memberikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan motivasinya kepada:

1. Keluarga tercinta, Bapak Muhaimin dan Ibu Mubariyah sebagai orang tua. Terima kasih untuk kalian semua yang kusayangi yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi serta saran-saran sehingga tesis ini berjalan dengan baik dan selesai tanpa halangan apapun.
2. Istriku tercinta Rani Dwi Salekhah yang telah memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan tesis.
3. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan selama perkuliahan di kelas yang tidak bisa saya sebut satu persatu di program Magister Ilmu Politik Angkatan tahun 2020, walaupun kita tidak pernah ketemu secara langsung didalam satu kelas tapi kelas magister ilmu politik yang menyatukan kita secara online.

Akhir kata dari peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan peneliti juga berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta menjadi bahan masukan bagi keilmuan Ilmu Politik kedepan. *Amin Ya Robbalalamin.*

Wassallamuallaikum Wr.Wb

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
MOTTO	III
Abstrak	V
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TABEL.....	XI
DAFTAR GRAFIK	XII
DAFTAR GAMBAR	XIII
DAFTAR BAGAN.....	XIV
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Signifikansi Penelitian	12
1.5 Literatur Review	12
1.6 Kerangka Teori	16
1.7 Operasionalisasi Konsep	40
1.8 Metode Penelitian	40
BAB II	
GAMBARAN UMUM PARLEMEN TERBUKA	48
2.1 Inisiatif Parlemen Terbuka di Indonesia.....	48
2.2 Partisipasi dalam legislasi.....	53
2.3 Pemulihan dan Reformasi secara Terbuka.....	56
2.4 Teknologi Parlemen Terbuka dan Tantangannya.....	57
2.5 Praktik Baik Parlemen Terbuka di berbagai negara dalam Penyusunan Legislasi.....	60
BAB III	
IMPLEMENTASI PARLEMEN TERBUKA DALAM MENDORONG	
FUNGSI LEGISLASI DI DPR RI	87
3.1 Transparansi Legislasi DPR RI.....	87
3.2 Akuntabilitas Penyusunan Legislasi.....	100

3.3 Partisipasi dalam Penyusunan Legislasi	103
3.4 Konfigurasi Politik di Internal DPR RI	111
3.5 Pengaruh Oligarki dan Elit Politik di DPR RI 2019-2024	122
BAB IV	
ANALISIS HASIL PENELITIAN	133
4.1 Transparansi penyusunan Legislasi DPR RI masih minim	133
4.2 Akuntabilitas DPR RI dalam penyusunan legislasi belum optimal.....	144
4.3 Permasalahan Internal Tim Parlemen Terbuka	148
4.4 Menguatnya Elit Politik dan Oligarki menjadikan DPR RI Parlemen Tertutup	150
BAB V	
KESIMPULAN DAN SARAN	153
5.1 Kesimpulan	153
5.2 Saran	155
DAFTAR PUSTAKA	159

DAFTAR TABEL

Tabel 1.6.1 Konfigurasi Politik Demokratis dan Konfigurasi Politik Otoriter.	27
Tabel 1.6.2 Klasifikasi Produk Politik Hukum Responsif dan Produk Politik Hukum Ortodoks	28
Tabel 1.8.1 Informan Penelitian	43
Tabel 2.1.1 <i>The Ladder of Citizen Participation</i> (Tangga Partisipasi Publik)	49
Tabel 3.1 Dasar Hukum Transparansi Fungsi Legislasi DPR RI	90
Tabel 3.1.1 Jumlah Penayangan Sidang Pembahasan RUU Objek IKL.....	95
Tabel 3.1.2 Transparansi Draf RUU dan Naskah Akademik di dalam Proses Proses Penyusunan Legislasi	98
Tabel 3.1.3 Transparansi Dokumen Laporan Singkat, Catatan Rapat dan Risalah Dalam Penyusunan Legislasi di DPR RI Periode 2019-2024.....	99
Tabel 3.2.1 Sinergi Antara Tiga Undang-Undang dalam Mewujudkan Akuntabilitas DPR RI	100
Tabel 3.3.3 Daftar Stakeholder yang diundang dalam Penyusunan UU Cipta Kerja...	103
Tabel 3.4.1 Kategori Terbuka, Sedikit Terbuka dan Tertutup dalam Proses Penyusunan Legislasi di DPR RI pada tahun 2019-2023	112
Tabel 3.5.1 Profil dan Peran Tim Satgas dan Panja Omnibuslaw Cipta Kerja	125
Tabel 4.1.1 Poin-Poin Untuk Perbaikan Transparansi Legislasi DPR RI.....	133
Tabel 4.1.2 Tahapan dalam Penyusunan Legislasi di DPR RI.....	135
Tabel 4.1.3 Transparansi tujuh RUU yang telah diselesaikan DPR dan Pemerintah pada Tahun 2020-2022	136
Tabel 4.2.1 Perolehan Suara Pemilu 2019	147

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Grafik Kinerja Legislasi DPR RI 2024-2021	Error! Bookmark not defined.	1
Grafik 1.2 Grafik Jumlah Anggota DPR RI 2014-2021 Tersangka Korupsi Berdasarkan Partai Politik.....		5
Grafik 4.1.1 Data Transparansi Dokumen Penyusunan Legislasi di DPR RI		141

DAFTAR GAMBAR

4.3.1 Gambar Ilustrasi Tim Parlemen Terbuka di DPR RI	151
---	-----

DAFTAR BAGAN

1.2 Operasionalisasi Konsep.....	41
1.7 Komponen Analisis Data	49